

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian di Dinas Sosial Kabupaten Kupang telah dilaksanakan karena jumlah anggaran didasarkan atas angka standar yang sudah diperhitungkan secara cermat dan juga berfungsi sebagai alat penilai efisiensi dimana realisasi biaya yang melebihi atau kurang dari jumlah yang dianggarkan dianggap merupakan pemborosan/penghematan yang sebenarnya. Dengan demikian selisih biaya (analisis variance) benar-benar dapat dinilai penyimpangan dari yang seharusnya untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan sebelum akhir periode yaitu setiap tiga bulan. Namun belum maksimal atau masih harus di perbaiki lagi yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap dua indikator pengendalian yaitu terjadinya kekurangan dan kelebihan anggaran serta salah sasaran dalam pengalokasian dana.
2. Mekanisme pengendalian yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Kupang dalam menjalankan kegiatan dengan cara: Melakukan pencatatan dan bukti setiap kali terjadi transaksi kas; Melakukan evaluasi minimal 3 bulan sekali untuk mengevaluasi anggaran kas sehingga dapat Memilih (tindakan korektif) dari kumpulan alternatif yang ada dan menerapkan tindakan tersebut; Memberi

tanggungjawab dan kekuasaan kepada petugas (bagian anggaran) untuk melakukan perencanaan awal anggaran kas dan bagian keuangan untuk mengelola keuangan terkait belanja. Sehingga proses kontrol dapat dilakukan oleh bagian anggaran dan juga bagian keuangan, sebab bagian anggaran juga mengetahui seluk-beluk anggaran yang ditetapkan dan Membandingkan realisasi aktual untuk periode yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyiapkan laporan realisasi yang berisi hasil aktual beserta hasil yang direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut.

## **6.2 Saran**

Berikut ini terdapat saran yang dapat penulis diberikan :

1. Dinas Sosial Kabupaten Kupang sebaiknya lebih cermat dalam menyusun anggaran agar asumsi-asumsi yang tidak sesuai yang menyebabkan beberapa anggaran melebihi realisasinya dapat diminimalisasi.
2. Dalam penyusunan anggaran sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Kupang tidak hanya menggunakan data dan informasi dari data aktual tahun-tahun sebelumnya tetapi juga harus melihat keadaan atau kondisi ke depan. Analisis yang digunakan dalam memperoleh input untuk penyusunan anggaran sebaiknya diperluas, serta terus memperhatikan perkembangan lingkungan internal dan eksternal sehingga perubahan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2002..*Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Herawati, Jajuk dan Sunarto 2004. *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta:penerbit AMUS
- Mahmudi.2010..*Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta:Erlangga.
- Mahmudi.2010..*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta :UPP STIM YPKN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: penerbit ANDI
- Munandar,2001..*Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE
- Munandar,2007..*Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE
- Nafarin, M. 2004..*Penganggaran Perusahaan*.Jakarta:Salemba Empat
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*.Jakarta:Salemba Empat
- Sangadji,Etta Mamang dan Sopiah.2010..*Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.Yogyakarta:ANDI.
- Sudaryono.2015..*Metodologi Riset di Bidang TI (Paduaan Praktis, Teori dan Contoh Kasus)*.Yogyakarta:ANDI
- Sugiarso, G dan F. Winarni. 2005..*Manajemen Keuangan(Pemahaman Laporan Keuangan,Pengelolaan Aktiva,Kewajiban dan Modal serta Pengukuran Kinerja Perusahaan)*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono.2001. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabeta.
- Shim,Jae.K.2000..*Budgeting Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran* .Jakarta:Erlangga
- Umar,Husein.2001..*Metode Penelitian dan Aplikasi Dalam Pemasaran*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Rudianto, 2009. *Penganggaran*. Jakarta: Erlangga.

Yuliati, 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta : UPP YKPN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006

[Http://dedesandi69.blogspot.ae/2013/03/normal.html](http://dedesandi69.blogspot.ae/2013/03/normal.html)